



DIY Berupaya Menjaga Kelangsungan Pertanian

YOGYA (KR) - Sensus pertanian sudah dilakukan mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2023, yang mencakup seluruh kabupaten/kota se-DIY. Sensus pertanian dinilai penting untuk database pertanian dan menentukan banyak kebijakan. Apalagi dari sektor pertanian, dapat berpengaruh pada pertumbuhan kemiskinan maupun inflasi di DIY. Oleh karena itu, memerlukan data-data yang akurat terkait dengan pertanian untuk memastikan berbagai kebijakan.

"Meskipun wilayah terbilang kecil dan cukup padat penduduk, namun DIY berupaya untuk menjaga kelangsungan pertanian. Karena pertanian, cukup banyak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di DIY. Untuk itu DIY berupaya menjaga lahan pertanian yang memang terbatas. Selain itu juga berupaya menggali potensi untuk bisa berinovasi pada pertanian hidroponik dan sebagainya. Hal itu untuk menyiasati keterbatasan lahan. Maka data dari sensus pertanian menjadi penting untuk kami menyusun strategi kebijakan," kata Wakil Gubernur (Wagub) DIY Sri Paku Alam X saat menerima Kepala

BPS DIY. Herum Fajarwati di Gedhong Pare Anom, Kompleks Kepatihan, Selasa (13/6). Kunjungan Kepala BPS DIY kali ini dalam rangka melaporkan pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023.

Paku Alam X mengimbau masyarakat untuk mendukung sensus pertanian agar berjalan lancar dan tepat waktu. Dukungan masyarakat menjadi hal paling pokok, mengingat yang sedang dilakukan pemerintah ini didasari untuk mengakomodir kebutuhan kesejahteraan masyarakat.

Salam kesempatan itu Kepala BPS DIY Herum menjelaskan, sensus yang sudah berjalan seki-

tar 2 minggu tersebut berjalan dengan baik.

Meskipun hasil sementara belum bisa dilihat, namun secara dashboard pemantauan telah berjalan dengan baik. Walaupun waktu sensus pertanian selama 2 bulan, namun khusus untuk Kota Yogyakarta hanya 1 bulan. Hal itu karena lahan pertanian di kota berbeda dengan di kabupaten. Lahan pertanian di kota Yogyakarta yang tercatat hanya 50 hektar saja memunculkan tradisi urban farming. Hal ini juga termasuk dalam sasaran sensus pertanian.

"Kami menasar perkotaan maupun pedesaan cuma memang metodenya yang berbeda. Kalau di perkotaan lebih ke snowball, jadi petugas kami menanyakan baik aparat setempat seperti ketua RT juga tokoh yang bisa memberikan informasi terkait kegiatan pertanian. Kemudian secara snowball akan wawancara rumah tangga yang mengusahakan pertanian. Untuk yang di kabupaten sistemnya door to door jadi setiap petugas akan mendatan-

gi sesuai dengan wilayah kerja yang sudah ditentukan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Sugeng Purwanto mengatakan, legal formal terkait dengan ekspose data ada berada di tangan BPS. Sensus pertanian akan menghasilkan data resmi dari pusat untuk kepentingan daerah. Selama ini, DIY memang memegang data sektor sebagai untuk basic perencanaan, namun hal ini tidak cukup, dan wajib dilengkapi dengan data yang lebih global lagi untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.

"Adanya sensus pertanian tahun ini akan menyajikan data-data yang lebih legal untuk dijadikan bahan kebijakan, bahan evaluasi, meskipun kami tidak menafikan bahwa data sektor itu juga sangat penting. Terkadang kan ada satu indikator kalau di BPS ini kan sifatnya boleh generalis tapi kan ada data-data yang sifatnya *lex specialis* karena lokus tempatnya, potensinya, serta masyarakat, masih diperlukan," jelas Sugeng. (Ria)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005